

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

2.1 Pembangunan

Dari sudut pandang ilmu ekonomi, pembangunan dapat diartikan sebagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan pendapatan per kapita (*income per capita*) yang berkelanjutan agar negara dapat memperbanyak output yang lebih cepat dibanding laju pertumbuhan penduduk. Terdapat tiga nilai-nilai atau komponen dasar yang berfungsi sebagai pedoman guna memahami arti pembangunan yang sebenarnya. Ketiga nilai ini tersebut adalah:

1. Kecukupan (*sustenance*), dimana segala sesuatu yang dibutuhkan baik itu sandang, pangan, papan terpenuhi guna mendukung kehidupan manusia pada tingkat yang paling minimum.
2. Harga diri (*self-esteem*), mengandung arti bahwa masyarakat akan merasa berharga ketika sistem, ekonomi, politik, dan lembaga sosial di negara tersebut menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti, martabat, kemandirian, integritas dan kehormatan.
3. Kebebasan (*freedom*), yang berarti bahwa masyarakat dapat mengambil pilihan riil sesuai keinginannya, dengan berbagai alternatif untuk memuaskan keinginannya (Todaro & Smith, 2011).

2.2 Pembangunan Manusia

Menurut *United Nations Development Programme* (1995) pembangunan manusia adalah proses memperluas pilihan-pilihan manusia, dalam hal ini yang paling utama adalah mengarah pada tingginya harapan hidup dan kesehatan, dapat hidup sesuai dengan standar kelayakan hidup dan dapat mengenyam pendidikan. Pembangunan manusia merupakan hal pokok yang harus dijunjung tinggi oleh pemerintah dari pada sekedar peningkatan pendapatan nasional semata. Pada dasarnya pembangunan manusia adalah pembangunan multi dimensi dalam upaya meningkatkan kemampuan insaninya menumbuhkan kreatifitas kehidupan yang sejalan dengan kebutuhan dan minatnya dalam rangka meningkatkan produktifitasnya.

Makna sesungguhnya dari pembangunan manusia menjadi dasar pemikiran bahwa sumberdaya manusia adalah harta kekayaan negara sesungguhnya dinamakan meskipun negara tersebut kaya akan alam dan seisinya tetapi tidak akan berarti bila tidak dikelola dan dijaga dengan baik oleh sumberdaya manusianya. Hal ini di sesuai dengan teori klasik Adam Smith (1729-1790) dimana manusia merupakan faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alam (tanah) tidak ada artinya jika tidak ada SDM yang pandai mengolahnya agar bermanfaat bagi kehidupan. Kesejahteraan manusia akan selalu meningkat sebagai dampak positif dari pembagian kerja dan spesialisasi, yang dimaksud dalam teori tersebut adalah seluruh sumber daya manusia baik itu kaya maupun miskin.

Orang miskin merupakan orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun demikian setidaknya mereka memiliki asset berupa tenaga fisik yang juga merupakan kekayaan negara sesungguhnya. Dengan tenaga fisik sebagai awalnya potensi sumber daya manusia akan meningkat bersamaan dengan meningkatnya pengetahuan, kesehatan serta pendapatan yang dimilikinya.

Pada tahun UNDP (1990) memberikan laporan yang menegaskan pentingnya pembangunan manusia (*human development*) bahwa asset bangsa yang sesungguhnya adalah manusia. Tujuan pokok dari adanya pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang dapat dinikmati secara utuh di umur yang panjang, sehat serta melaksanakan kehidupan yang produktif. Tujuan pokok tersebut merupakan kenyataan yang sederhana tetapi sangat sering terlupakan oleh manusia dikarenakan kesibukannya dalam jangka pendek. Dalam laporan UNDP tahun 1996 menjelaskan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan akhir dari pembangunan (*the ultimate end*), sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah sarana (*the principle means*) untuk mencapai tujuan akhir pembangunan. Dalam rangka mewujudkan tujuan akhir pembangunana tersebut, ada 4 komponen pokok yang harus diperhatikan dalam pembangunan manusia, yaitu :

1. Produktivitas (*productivity*), yang berarti bahwa manusia yang produktif itu adalah manusia yang berguna mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, keluarga dan bangsanya. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan manusia, dan juga merupakan variable

yang nantinya akan berdampak pada indeks pembangunan manusia (UNDP, Human Development Report, 1995).

2. Keadlian (*equality*), yang berarti bahwa segala hal yang tidak adil dalam kehidupan manusia harus di hapuskan seperti praktik monopoli politik maupun monopoli ekonomi karena manusia merupakan makhluk social yang setiap individunya diberi kesempatan yang sama untuk menjalankan hidup yang lebih baik sesuai dengan aturan yang telah ditentukan secara konstitusional dan demokratis (UNDP, Human Development Report, 1995).
3. Keberlanjutan (*sustainability*), yang bermakna bahwasanya setiap individu mempunyai tanggungjawab dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan yang artinya sumber daya yang dapat diperbaharui yang tersedia saat ini merupakan kekayaan yang nantinya akan diperlukan oleh generasi yang akan datang yang harus dijaga, sedangkan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui harus digunakan secara bijak dan mencari substitusi sumberdaya alternatif dari sumberdaya tersebut (UNDP, Human Development Report, 1995).
4. Pemberdayaan (*empowerment*), kita ketahui bahwa manusia memiliki keterbatasan masing-masing dalam mensejahterakan kehidupannya, sehingga perlu diadakannya pemberdayaan optimal agar terwujudnya pembangunan manusia. Dengan adanya pemberdayaan maka seluruh masyarakat berpartisipasi penuh dalam proses pengambilan putusan yang

mempengaruhi kesejahteraan mereka (UNDP, Human Development Report, 1995)

2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Menurut Badan Pusat Statistik (2015), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir.

Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Umur IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

a. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia memiliki tiga indikator dasar yang digunakan untuk menghitung indeks manusia suatu negara, yakni:

1. Tingkat kesehatan yang diukur adalah harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi)
2. Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot dua pertiga)
3. Indeks hidup layak yang diukur dengan tingkat pengeluaran per kapita per tahun.

Dalam mengukur indeks pembangunan manusia menggunakan rumus sebagai berikut :

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3) \quad \dots\dots\dots (1)$$

Dimana:

X_1 = Indeks kesehatan

X_2 = Indeks pendidikan

X_3 = Indeks standar hidup layak

Langkah awalnya adalah menghitung terlebih dahulu indeks ketiap komponen, yang diberi nilai antara 0 (terendah) dan 1 (terbaik) dan dalam rangka memberi kemudahan dalam menganalisa biasanya indeks ketiga komponen tersebut dikalikan 100.

b. Komponen-komponen IPM

1. Indeks Harapan Hidup

Indeks harapan hidup menunjukkan banyaknya tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati oleh penduduk di suatu wilayah dengan menggunakan angka kematian dan kelahiran per tahun yang akan memperlihatkan tingkat hidup sehat dan rata-rata lama hidup. Karena terdapat kesulitan dalam memperoleh data orang yang meninggal dalam kurun waktu tertentu, maka digunakan metode tidak langsung dalam menghitung angka harapan hidup. Data yang digunakan dalam metode ini adalah rata-rata anak masih hidup dari wanita yang pernah kawin dan rata-rata anak lahir hidup (BPS, 2009).

2. Indeks Pendidikan

Rata-rata lama sekolah/ *Mean Years Of Schooling Index*(MYS) dan angka melek huruf / *Adult Literacy Rate Index*(Lit) adalah dua indikator pada perhitungan indeks pendidikan. Kedua indikator tersebut diharapkan dapat menggambarkan tingkat pengetahuan (cerminan angka Lit) yang merupakan komponen masyarakat yang mampu baca tulis dalam kelompok masyarakat keseluruhan (BPS, 2009).

3. Indeks Hidup Layak

Indeks hidup layak merupakan gambaran daya beli masyarakat. Menurut UNDP *real per capita GDP adjusted* / PDB riil per kapita yang disesuaikan merupakan indikator yang digunakan dalam menghitung standar hidup layak (daya beli), akan tetapi dalam perhitungan IPM se-nasional (kabupaten/kota dan provinsi) tidak menggunakan PDRB perkapita dikarenakan hanya mengukur produksi suatu wilayah. Sedangkan di Indonesia dalam mengukur standar hidup layak masyarakat BPS menggunakan data dari Survei Sosial Ekonomi Masyarakat yakni data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih yang dominan dikonsumsi masyarakat Indonesia yang disesuaikan dengan indeks PPP (*Purchasing Power Parity*) (BPS, 2009).

c. Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

IPM dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal sebagai berikut:

- a) Untuk menyadarkan para pengambil keputusan agar lebih terfokus pada pencapaian manusia, Karena IPM diciptakan untuk menjadi hal utama dalam pembangunan sebuah negara, bukan pertumbuhan ekonomi.
- b) Untuk mempertanyakan pilihan-pilihan kebijakan suatu negara. Bagaimana dua negara yang tingkat pendapatan perkapitanya sama dapat memiliki IPM yang berbeda.

- c) Untuk memperlihatkan perbedaan di antara negara-negara, di antara provinsi-provinsi (atau negara bagian), di antara gender, kesukuan, dan kelompok sosial ekonomi lainnya. Dengan memperlihatkan disparitas atau kesenjangan di antara kelompok-kelompok tersebut, maka akan lahir berbagai debat dan diskusi di berbagai negara untuk mencari sumber masalah dan solusinya.

2.4 Pengeluaran Pemerintah

Pemerintah merupakan lembaga didalam masyarakat yang tujuannya tidak lain adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera. Dalam rangka memenuhi fungsi dan tugas tersebut maka pemerintah memiliki hak dalam menggunakan barang dan jasa disuatu negara dalam berbagai bentuk, salah satunya berupa uang. Ketika pemerintah menggunakan uang tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka inilah yang disebut dengan pengeluaran pemerintah.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mangkoesubroto yang mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah adalah gambaran kebijakan pemerintah yakni, ketika pemerintah memilih kebijakan untuk membeli barang dan jasa maka pengeluaran tersebut adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut (Mangkoesubroto, 2000).

Dalam pemerintahan terdapat anggaran belanja yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan salah satunya yang cukup penting adalah pengeluaran pembangunan yang dalam hal ini pembangunan tersebut telah

direncanakan pemerintah dalam penyusunan anggaran yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan. Anggaran yang tersedia adalah variabel penting bagi proses pembangunan suatu negara, sehingga alokasi anggaran tersebut harus dipertimbangkan secara matang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yang berpegang teguh pada Pancasila, Trilogi Pembangunan dan Undang-Undang Dasar 1945 (Suparmoko, 1994).

Pada pengeluaran pemerintah dibagi menjadi beberapa sektor antara lain adalah :

a. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan

Beberapa ekonom berpendapat bahwa kesehatan adalah fenomena ekonomi ketika dianggap sebagai sebuah investasi, yang akhirnya kesehatan menjadi salah satu variable yang dianggap penting untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa dalam faktor produksi dan juga sebagai tujuan masyarakat yang dikenal dengan kesejahteraan. Sehingga kesehatan dikenal sebagai modal yang positif bagi masyarakat.

Undang-Undang No.36 tahun 2009 yang mengatur tentang dana kesehatan bahwa minimal anggaran kesehatan dialokasikan sebesar 5 persen dari APBN diluar gaji, dan anggaran kesehatan daerah provinsi dan kabupaten/kota sebesar 10 persen dari APBD diluar gaji. Oleh sebab itu sudah sepatutnya pemerintah memberikan layanan publik yang yang memadai dalam rangka peningkatan kualitas manusia yang selanjutnya akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Maryani, 2010).

b. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan

Ada beberapa sumber dana pendidikan di Indonesia yaitu anggaran pemerintah pusat, anggaran pemerintah tingkat provinsi dan anggaran pemerintah tingkat kabupaten. Pada hal ini akan membahas tentang anggaran pemerintah pusat dalam bidang pendidikan. Pada dasarnya dana pendidikan bersumber dari pemerintah pusat baik itu berupa (1) anggaran rutin seperti membiayai Sekolah Dasar (SD), administrasi sesuai dengan kegiatan pendidikan, sekolah-sekolah negeri, serta gaji guru. (2) anggaran kegiatan pengembangan fisik seperti pembangunan gedung, proyek-proyek perintisan, pengadaan tanah dan sarana penunjang lainnya.

Dalam pengeluaran pemerintah bidang pendidikan Indonesia harus mampu membagi dengan baik anggaran, baik untuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan agar peningkatan pengeluaran pemerintah dalam pendidikan ini sesuai dengan yang diharapkan, karena pengeluaran untuk belanja pokok pendidikan lebih kepada mempertahankan fasilitas pendidikan yang ada dari pada memperluas fasilitas tersebut, padahal di masih banyak daerah terpencil yang membutuhkan bantuan pembangunan fasilitas pendidikan, sehingga pendidikan di Indonesia belum berkembang dengan baik yang akhirnya mempengaruhi IPM di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan pendapat Sukirno (1985) yang menyatakan salah satu faktor yang menimbulkan hal tersebut adalah kurangnya fasilitas dan gaji yang relatif rendah yang menurunkan semangat guru-guru dalam memberikan pelajaran bagi murid atau mahasiswa dengan sebaik-baiknya.

Hal ini menunjukkan bahwasanya anggaran pembangunan dari Departemen Pendidikan Nasional adalah sumber utama dalam memperbaiki mutu pendidikan.

Menurut Umar Tirtarahardja dan la Sula (1998) permasalahan di atas dapat diatasi bila :

1. Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, minimal alokasi dana pendidikan dari APBN adalah 20 persen dan dari APBD 20 persen.
2. Pemerintah dapat memberikan kesempatan pemerataan pendidikan, yang berarti bahwa pemerintah dapat menyediakan tempat untuk melakukan pemerataan tersebut yaitu sekolah.
3. Pendidikan yang bermutu merupakan salah satu jawaban dari masalah diatas, artinya seluruh perencanaan dan proses pendidikan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang dirumuskan.
4. Pelaksanaan pendidikan efisien yang sesuai rancangan.
5. Produk bermutu yang relevan, yang mengandung arti bahwa hasil akhir dari pendidikan sesuai dengan pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

2.5 Penanaman Modal / Investasi

Investasi merupakan pembelanjaan penanaman modal guna membeli barang-barang modal serta perlengkapan produksi untuk meningkatkan produksi barang dan jasa di dalam perekonomian, sehingga investasi disebut juga penanaman modal. Menurut Adhisasmita (2005), mengatakan bahwa perpindahan modal atau investasi merupakan sarana bagi proses kumulatif, baik dilakukan oleh pemerintah maupun swasta yang mengarah kebawah di daerah bernasib kurang baik dan mengarah keatas di daerah bernasib baik. Penanaman modal terbagi menjadi dua yakni :

a. Penanaman Modal Asing

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan modal dalam negeri. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, modal asing dalam undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang ini yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia dalam arti bahwa pemilik menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas, Ismail Sunny dan Rudio Rochmat (1968) berpendapat bahwa pada PMA terdapat tiga unsure pokok, yakni :

1. Penanaman modal secara langsung

2. Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan
3. Resiko yang langsung ditanggung oleh pemilik modal

Menurut David K. Eiteman (1989), motif yang mendasari penanaman modal asing ada tiga yaitu motif strategi, motif perilaku ekonomi. Pada motif strategis dibesakan dalam mencari pasar, mencari bahan baku, mencari efisiensi produk, mencari pengetahuan serta keamanan politik. Sedangkan motif pelaku adalah rangsangan lingkungan eksternal dan yang lain dari organisasi didasarkan pada kebutuhan serta komitmen individu maupun kelompok. Disisi lain motif ekonomi merupakan motif untuk mencari keuntungan dengan memaksimalkan keuntungan jangka panjang dan harga pasar saham perusahaan.

b. Penanaman Modal Dalam Negeri

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 1 Tahun 1968 tentang PMDN mengatakan bahwa bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda baik yang dimiliki swasta nasional maupun swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing.

Ditinjau dari dampaknya, investasi berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat baik itu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), hal ini disebabkan karena investasi akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang

terserap. Pengangguran pun akan mendapat pekerjaan dan pendapatan. Seiring dengan meningkatnya pendapatan, maka daya beli masyarakat juga akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan pendapatan akan mengakibatkan peningkatan jumlah IPM bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan pemerataan pendapatan dalam masyarakat (Sumanto, 2012).

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan yang juga mengkaji tentang Indeks Pembangunan Manusia, baik yang mengambil studi kasus di Jawa Tengah maupun daerah yang lainnya.

Setiawan dan Hakim (2013) telah melakukan penelitian tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Variabel-variabel yang digunakan adalah Produk Domestik Bruto (PDB), Pajak Pendapatan (PPN), variable dummy desentralisasi pemerintahan, variabel dummy krisis tahun 1997, dan variable dummy krisis tahun 2008. Metode yang digunakan adalah *Error Correction Model* (ECM). Pada penelitian ini ditemukan bahwa PDB dan PPN berpengaruh terhadap IPM dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Estimasi model ECM menemukan bahwa krisis ekonomi tahun 2008 berpengaruh terhadap IPM, sementara krisis tahun 1997 dan desentralisasi pemerintahan berpengaruh negatif terhadap IPM.

Yuliati (2012) dalam kajiannya tentang faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah perbatasan darat Indonesia. Dalam penelitian ini meneliti variable-variabel yang

mempengaruhi IPM yakni: PDRB per kapita, rasio tenaga pendidikan SMP dan tingkat pengangguran terbuka, dan Persentase Penduduk Miskin, data yang digunakan adalah data skunder dari Badan Pusat Statistik dalam kurun waktu 2007-2010 dan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel. Penelitian ini dilakukan di kabupaten perbatasan darat sebanyak 16 kabupaten pada 4 provinsi yaitu: Kalimantan Barat 5 kabupaten (Sambas, Bengkayang, Sintang, Sanggau dan Kapuas Hulu), Kalimantan Timur 3 kabupaten (Nunukan, Malinau dan Kutai Barat), Nusa Tenggara Timur 3 kabupaten (Kupang, Belu dan Timor Tengah Utara), dan Papua 4 kabupaten (Merauke, Boven Digoel, Pegunungan Bintang dan Keerom) dan 1 kota yaitu Kota Jayapura. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PDRB per kapita signifikan berpengaruh positif terhadap IPM, sedangkan persentase penduduk miskin signifikan berpengaruh negatif terhadap IPM, dan rasio tenaga pendidikan SMP dan tingkat pengangguran terbuka tidak signifikan berpengaruh terhadap IPM di Indonesia.

Kajian pembangunan manusia dilakukan oleh Sugiarto Sumas yang berfokus pada kebijakan fiskal sektor pendidikan dan sektor kesehatan dengan menggunakan data panel. Hasil analisis dari studi ini adalah sejak tahun 2004 hingga 2008 menunjukkan bahwasanya kebijakan fiskal melalui sektor pendidikan dan sektor kesehatan mempunyai hubungan kausalitas terhadap indeks pembangunan manusia meskipun dampaknya kecil. Dalam rangka meningkatkan IPM di Indonesia maka kebijakan fiskal yang paling efektif adalah dengan upaya meningkatkan daya beli masyarakat.

Penelitian tentang Indeks Pembangunan Manusia juga dilakukan Athar (2016). Penelitian ini mengaitkan Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan dan PDRB terhadap Pembangunan Manusia Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat. Studi ini dilakukan di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2006-2013. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan teknik estimasi menggunakan *Random Effect Model*(REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel belanja pendidikan berpengaruh signifikan positif terhadap IPM. Variabel belanja kesehatan berpengaruh signifikan positif pada terhadap IPM. Variabel PDRB berpengaruh signifikan positif pada alpha 5 persen terhadap IPM. Variasi variabel independen dalam model mampu menjelaskan tingkat pencapaian IPM.

Selain itu, Pimpin Primananda juga meneliti tentang yang berfokus pada kinerja perekonomian daerah dan desentralisasi fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2009 sampai dengan 2013. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Dari studi ini disimpulkan bahwa Desentralisasi Fiskal dan Perekonomian daerah berpengaruh signifikan terhadap IPM (Primananda, 2015).

Royan dkk (2015) juga meneliti tentang IPM yang berfokus pada pengaruh investasi publik dan swasta terhadap IPM di Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda menggunakan data panel tahun 2010-2013 pada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Hasil studi

menunjukkan bahwa investasi publik dan swasta sama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan IPM di Jawa Timur. Peran Publik lebih besar dibanding swasta hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi yang relatif besar. Koefisien pada masing-masing kabupaten/kota berbeda, hal ini diduga karena kurangnya pemerataan investasi pada masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur.

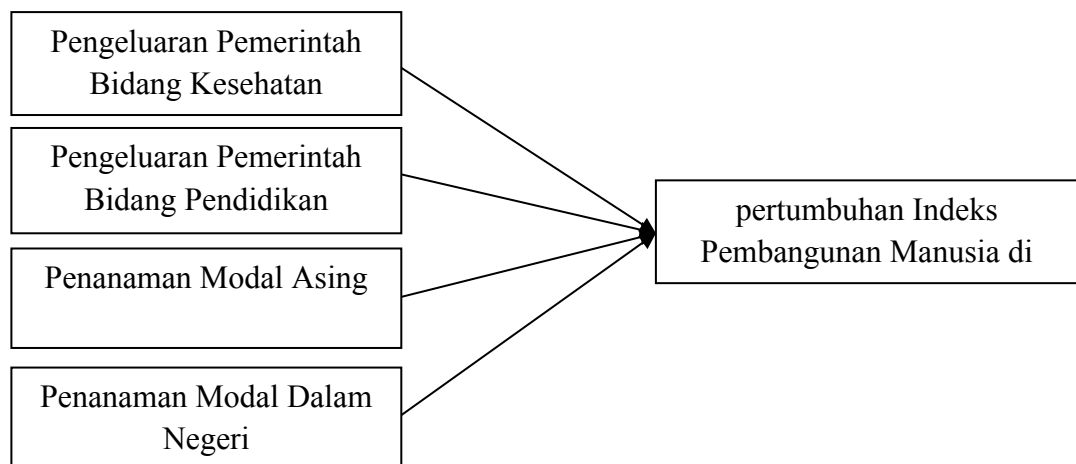
Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Variabel	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Indeks Pembangunan Manusia	Mohammad Bhakti Setiawan dan A. Hakim	Produk Domestik Bruto (PDB), Pajak Pendapatan (PPN), variable dummy desentralisasi pemerintahan, variabel dummy krisis tahun 1997, dan variable dummy krisis tahun 2008.	<i>Error Correction Model</i> (ECM).	Pada penelitian ini ditemukan bahwa PDB dan PPN berpengaruh terhadap IPM dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Estimasi model ECM menemukan bahwa krisis ekonomi tahun 2008 berpengaruh terhadap IPM, sementara krisis tahun 1997 dan desentralisasi pemerintahan berpengaruh negatif terhadap IPM.
2	Analisi faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Wilayah Perbatasan Darat Indonesia.	Ambar Yuliati	PDRB per kapita, rasio tenaga pendidikan SMP dan tingkat pengangguran terbuka, dan Persentase Penduduk Miskin	Analisis regresi data panel	Pada penelitian ini ditemukan bahwa PDB dan PPN berpengaruh terhadap IPM dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Estimasi model ECM menemukan bahwa krisis ekonomi tahun 2008 berpengaruh terhadap IPM, sementara krisis tahun 1997 dan desentralisasi pemerintahan berpengaruh negatif terhadap IPM.
3	Dampak Kegiatan Fiskal Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap	Sugiarto Sumas	Kebijakan fiskal sektor pendidikan dan sektor kesehatan	Analisis regresi data panel	Hasil analisis dari studi ini adalah sejak tahun 2004 hingga 2008 menunjukkan bahwasanya kebijakan fiskal melalui sektor pendidikan

	Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia				dan sektor kesehatan mempunyai hubungan kausalitas terhadap indeks pembangunan manusia meskipun dampaknya kecil.
4	Pengaruh belanja Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan, Dan PDRB Terhadap Pembangunan MANusia PAda Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006-2013	Muhammad Athar	Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan dan PDRB	<i>Random Effect Model</i> (REM)	Variabel belanja pendidikan berpengaruh signifikan positif terhadap IPM. Variabel belanja kesehatan berpengaruh signifikan positif pada terhadap IPM. Variabel PDRB berpengaruh signifikan positif pada alpha 5 persen terhadap IPM.
5	Kinerja Perekonomian, Desentralisasi Fiskal, Dan Hubungannya Dengan Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur	Pimpin Piramida	Kinerja Perekonomian, Desentralisasi Fiskal, Pembangunan Manusia	Regresi data panel	Dari studi ini disimpulkan bahwa Desentralisasi Fiskal dan Perekonomian daerah berpengaruh signifikan terhadap IPM
6	Pengaruh Investasi Publik Dan Swasta Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Jawa Timur	Mohamad Miftahur Royan, Aisah Jumiaty, Fajar Wahyu Prianto	Investasi publik dan swasta	Regresi Linear Berganda	Investasi publik dan swasta sama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan IPM di Jawa Timur. Peran Publik lebih besar dibanding swasta hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi yang relatif besar

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan dalam menentukan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, maka variable-variabel yang akan diteliti adalah pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dalam kerangka berfikir sebagai berikut:



D. Hipotesis

Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan berpengaruh positif signifikan pada IPM, hal ini menunjukkan bahwa dengan ditingkatkannya PPBK dan PPBP maka akan meningkatkan pembangunan manusia. Dikatakan lain bahwa PPBK dan PPBP yang disalurkan oleh pemerintah dapat meningkatkan kompetensi masyarakat

serta kesehatannya, karena PPBK dan PPBP merupakan dua indikator penting dalam pembangunan IPM. sudah sepatutnya pemerintah memberikan layanan publik yang memadai dalam rangka peningkatan kualitas manusia yang selanjutnya akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Maryani, 2010).

Menurut Pramono dan Rofi (2011) PMA berpengaruh positif terhadap IPM, hal ini didukung juga oleh Ningrum (2015) bahwasanya investasi baik itu PMA maupun PMDN berpengaruh positif terhadap Indeks pembangunan Manusia (IPM). Dengan meningkatnya jumlah investasi maka terjadi pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan peningkatan IPM.

Berdasarkan konsep, teori yang telah dikemukakan terdahulu dan telaah pustaka dapat disimpulkan, adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Pertumbuhan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan indeks pembangunan manusia di Indonesia.
2. Pertumbuhan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan indeks pembangunan manusia di Indonesia.
3. Pertumbuhan penanaman modal asing berpengaruh positif terhadap pertumbuhan indeks pembangunan manusia di Indonesia.
4. Pertumbuhan penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif terhadap pertumbuhan indeks pembangunan manusia di Indonesia.